BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Setiap negara, dalam mencapai tujuannya menggunakan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Sistem ekonomi yang berkembang saat ini di dunia adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam.

Salah satu sistem ekonomi yang saat ini mendapat pengakuan dunia adalah sistem ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi syari'ah. Kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam muncul serta mengalami perkembangannya sejak tahun 1970-an, baik di Timur Tengah maupun di negara-negara Islam yang lain. Sejak saat itu, sistem ekonomi Islam muncul sebagai wacana dan dipandang sebagai suatu alternatif pilihan.

Sistem ekonomi Islam menjadi alternatif pilihan karena sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Tujuan ekonomi Islam bukan semata-mata pada materi saja, tetapi mencakup berbagai aspek seperti: kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik, memberikan nilai yang sangat tinggi bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani bagi seluruh ummat

manusia. Dengan kata lain, di dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman pada setiap keputusan manusia.

Pengetahuan masyarakat tentang haramnya riba membuat mereka kini mulai beralih ke sistem ekonomi Islam. Salah satu langkah yang dilakukan oleh masyarakat adalah beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syari'ah.

Fakta lain yang menyatakan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syari'ah baik yang berupa bank maupun nonbank. Lembaga keuangan syariah non bank diwujudkan dalam bentuk asuransi syariah, BMT, dan Koperasi syariah.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang cukup berperan menumbuh kembangkan perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan usaha gerakan rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Saat ini koperasi di Indonesia sudah berkembang cukup pesat, hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya jenis koperasi yang didirikan. Perkembangan koperasi yang semakin pesat juga dipengaruhi oleh masyarakat yang semakin mengetahui manfaat dari adanya koperasi yang dapat membantu perekonomian serta mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial, artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat.[1]

[1] Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 17

Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian tentang KJKS BMT yang berada di Sumatera Barat diantaranya penelitian Variyetmi Wira dan Gustati tentang Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah Kota Padang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan bekerjasama langsung bersama masyarakat. KJKS diharapkan sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan yang miskin.[2]

Penelitian Testru Hendra tentang Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, hasil penelitian menunjukkan konsep yang diaplikasikan pada koperasi sejalan dengan konsep yang diajarkan Islam, yaitu bertujuan kerjasama antara anggota dengan tujuan kesejahteraan anggotanya dan terlihat jelas bahwa koperasi memihak kepada ekonomi kerakyatan. Apabila berkembang dan dapat dilaksanakan secara konsisten, dengan berpedoman pada konsep ekonomi syariah; tauhid, *rububiyah*, khilafah dan tazkiyah maka

[2]Variyetmi Wira dan Gustati, *Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Kota Padang*, Snema-2015, ISBN: 978-602-17129-5-5

pemberdayaan ekonomi umat Islam dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat serta keadilan ekonomi dapat diwujudkan.[3]

Penelitian Erman tetang Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Syariah Di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang menunjukkan untuk kompetensi operasionalnya adalah bahwa setiap manajer yang mengelola harus memiliki visi membangun ekonomi pengusaha kecil produksi supaya mendapatkan kesejahteraan dan kemudahan dalam menjalankan usaha dan semua yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas harus memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah karena salah satu tujuan keberadaan BMT ini adalah menyuburkan jual beli dan menghabiskan perekonomian yang memakai sistim riba.[4]

Penelitian Ahmad Wira dan Septia tentang Potensi Pendirian BMT di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan BMT yang akan didirikan mempunyai kekuatan dan berpeluang hal ini dilihat dari analisis internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Sehingga sangat memungkinkan untuk mendirikan BMT di tempat penelitian.[5]

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa peneliti terdahulu telah mengkaji tentang peran koperasi syariah dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat dan koperasi tersebut akan berkembang apabila pengelola koperasi memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah karena tujuan koperasi syariah ini

[3]Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), No.1, Vol.1, 2016

[4]Erman, *Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Syariah Di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang,* Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, No. 2, Vol.2, 2017

[5] Ahmad Wira Dan Septia, *Potensi Pendirian Bmt Di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat,* Juris Vol. 14, No 1, 2015

adalah menyuburkan jual beli dan menghabiskan perekonomian yang memakai sistim riba. Namun belum ada penellitian yang mengkaji tentang design strategi pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang sangat berpotensi untuk perkembangan lembaga keuangan syariah. Selain memiliki julukan kota Serambi Mekkah, Padang Panjang juga memiliki banyak sekolah Islam seperti Pesantren, Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Hal ini membuktikan bahwa Kota Padang Panjang juga berpotensi untuk melahirkan generasi yang lebih paham dengan ekonomi syariah.

Saat ini di Kota Padang Panjang lembaga keuangan syariah yang beroperasi terdiri dari dua Bank Syariah yakni BSM Cabang Padang Panjang dan Bank Nagari Syariah. Namun belum banyak lemaga keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah dikota Padang Panjang.

Padang Panjang memiliki 48 koperasi dibawah pengawasan dinas koperindag. Pemerintah kota Padang Panjang ingin menerapkan pengelolaan Koperasi Syariah di kota Padang Panjang, karena selama ini banyak masyarakat yang meminjam dana kepada orang batak dan saat terjadi peminjaman dana oleh anggota koperasi, dananya sering tidak kembali. Namun saat ini pengelola koperasi di Padang Panjang masih bingung bagaimana dan seperti apa koperasi Syariah itu. Kepala bidang koperasi UMKM juga menyebutkan bahwa telah mengadakan pelatihan untuk pengelola koperasi yang ada di Padang Panjang dengan mendatangkan ahli di bidang koperasi syariah untuk beralih ke koperasi Syariah, tidak hanya itu saja koperasi UMKM juga telah meminta Ulama dan Pakar

Ekonomi Syariah untuk membimbing dan mengawasi koperasi yang ada di Padang Panjang.[6]

Pemerintah kota Padang Panjang yang bergerak dibidang koperasi sudah memiliki keinginan dan mulai mencari cara untuk menerapkan koperasi syariah di Kota Padang Panjang. Koperasi di Kota Padang Panjang berjumlah 48 koperasi, saat ini ada 20 koperasi yang sedang proses konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah.

Daftar Koperasi Proses Konversi ke Syariah di kota Padang Panjang

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1	KSP Syariah ISI	Jl. Bahder Johan No.35 Komplek ISI Kelurahan Guguk Malintang
2	Koppontren Diniyah Putri	Jln. Abdul Hamid Hakim No.30 Kelurahan Pasar Usang
3	KPRI Serambi Mekah	Jln. St. Syahrir no.124 Kode Pos 27118 Silaing Bawah
4	KSU Sehati	Jln. Bagindo Azis Chan Kelurahan Tanah Hitam
5	KSU Amal Husna	Jln. Abdullah Ahmad No.11 RT.4 Kelurahan Pasar Usang
6	KPN SLTP 1	Jln. Soedirman No.41 Kelurahan Balai-balai
7	KPRI Kopesda	Jln Bundo Kandung Kel Malintang (SDN 04)
8	KPRI MAN Koto Baru	Jln. Pendidikan No.1 Kompek Man Koto Baru
9	KPRI SMUN 2	Jln. Bundo Kanduang No.2 RT.008 Kelurahan Malintang
10	Kopkar Yarsi	Jln. Soekarno Hatta No.23 Padang Panjang
11	KPRI RSUD	Jln Ahmad Dahlan No 05
12	KPRI SMPN 3	Jln Ahmad Yani No 03
13	KPRI SMA N 1	Jln. K.H.Ahmad Dahlan No.09 Kelurahan Guguk Malintang
14	KPRI Sedar	Jln. Bundo kanduang Kelurahan Guguk Malintang
15	KPN SMP N 2	Jln Sutan Syahrir
16	KPN Kokandiko	Jln. Bundo kanduang No.1 Kelurahan Guguk Malintang
17	KPRI SMK 1	Jln. K.H.Ahmad Dahlan No.70 Kelurahan Guguk Malintang

[6] Wawancara dengan kepala bidang koperasi UMKM buk Ernawati, SH

18	KPRI SMPN 4	Jln. Hos Cokroaminoto No.22 Kelurahan Silaing Atas
19	KPRI Koprida Depag	Jln. Urip Sumoharjo No.76 Kelurahan Tanah PakLambik
20	KPRI MTsN	Jl. Soekaro Hatta kelurahan Bukit Surungan

Sumber : Dokumen Koperasi UMKM Padang Panjang

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam dan menuangkanya dalam bentuk penelitian yang berjudul **"*Design Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus masalah di atas maka yang akan menjadi Rumusan Masalah dari kajian ini adalah :

1. Apa saja aspek-aspek yang dimiliki koperasi di kota Padang Panjang untuk konversi
2. Apa saja factor eksternal (peluang dan ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan) pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang
3. Apa alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang dimiliki koperasi di kota Padang Panjang untuk pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang

2. Mengetahui faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan) pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang
3. Mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

   Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan prospek koperasi Syariah. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Teoritis
   a. Upaya pemberdayaan ekonomi koperasi berbasis syariah di Kota Padang Panjang.
   b. Sebagai masukan dan refensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian tentang koperasi syariah
3. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan Ekonomi Syariah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang prospek Koperasi Syariah.

BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1 Desain Strategi

Desain berarti perencanaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utama perencanaan strategi adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.[7]

2.1.1 Tipe-tipe Strategi

a. Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategu secara makro. Misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya.

b. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakkan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisibaru atau strategi divestasi dan sebagainya.

[7] Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cetakan 24*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 3

c. Strategi Bisnis

Sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya, strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.

2.2 Koperasi

2.1 Pengertian Koperasi

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation (*co*: bersama dan *operation*: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.[8]

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Koperasi).

[8] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Cetakan 2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 226

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Lihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian) Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

2.2 Dasar Hukum Koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi (SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengaturan koperasi BMT diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004). Dalam ketentuan ini koperasi BMT disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka BMT yang beroperasi secara sah di wilayah Republik Indonesia adalah BMT yang berbadan hokum koperasi yang izin operasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya.

Selain harus sesuai dengan Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 ini, koperasi BMT (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25Tahun 1992 tentang perkoperasian.

2.3 Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing- masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.[9]

2.3.1 Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu :

a. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

b. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.

[9] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 272

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang- barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

2.3.2 Berdasarkan keanggotaannya

Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari:

a. Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

Hendrojogi mengemukakan bahwa Koperasi Pegawai Negeri pada umumnya berpusat di Ibukota atau Kabupaten. Dilihat pada jajaran Koperasi Pegawai Negeri pada tingkat Propinsi, induk Koperasi Pegawai Negeri Indonesia (IKPN-RI) berkedudukan di Ibukota Negara. Anggota-anggotanya adalah gabungan Koperasi Pegawai Negeri yang berkedudukan di Ibukota Propinsi. Anggota-anggota daro

GPKN ini adalah Pusat Koperasi Pegawai Negeri yangn berada di Ibukota Kabupaten-Kabupaten. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang anggotanya adalah orang-orang dan mempunyai wilayah kerja Kecamatan atau berada dalam lembaga Pemerintah atau di sekolah-sekolah atau di kecamatan yang selanjutnya disebut KPN Primer[10]

b. Koperasi Pasar (Koppas)\

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.

c. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan).

d. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

2.3.3 Berdasarkan tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya, koperasi terdiri dari:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

[10] Hendrajogi, *Koperasi Azas Azas, Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 75

b. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.[11]

2.4 Koperasi Syari'ah

2.4.1 Pengertian Koperasi Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).[12]

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi

[11] Ibid, hlm.6

[12] Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 159-160.

hambatan operasioanalisasi di daerah-daerah. Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya. [13] Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 propinsi.[14]

Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena BMT didaerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.[15]

Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai- nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.[16]

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

---

[13] Ahmad Sumiyanto, *BMT Munuju Koperasi Modern*, (Magelang: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), Hlm. 23

[14] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), Hlm. 98

[15] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wattamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), Hlm. 7

[16] Ahmad Sumiyanto, *BMT Munuju Koperasi Modern*, op.cit., Hlm. 24

Seperti yang terkutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip- prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur'an.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia.

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multi purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.[17]

2.4.2 Tujuan Pengembangan Koperasi Syariah

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh dan Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 291

c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2.4.3 Pembiayaan

2.4.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[18] Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 *tentang* Perbankan, pembiayaan syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang

[18] Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 195

atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan".[19]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan koperasi syari'ah juga menganut asas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang sia-sia.

Menurut Muhammad Ridwan Kualitas aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan:[20]

a. Prospek usaha
b. Kinerja (*performance*) nasabah

[19] UU No. 9 Tahun 1995. Tentang Perkoperasian
[20] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wattamwil (BMT),* op.cit., Hlm. 77

c. Kemampuan membayar

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet (Pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006).[21] Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.4.3.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :[22]

a. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun *investasi*.

[21] Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 168

[22] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, op.cid., Hlm. 72

b. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2) Pembiayaan *investasi*, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang *konsumtif*.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.[23]

[23] Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, op.cid., Hlm. 160

2.4.3.3 Bentuk-bentuk Pembiayaan

1) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain. Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif[24].

Pembiayaan dimana koperasi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang akan diserahkan dengan syarat-syarat tertentu, dimana bank berlaku sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran . Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan langsung setelah akad, sementara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan.

2) Pembiayaan Salam

Secara bahasa as salam atau as salaf berarti pesanan. Secara terminologi para ulama mendefinisikan dengan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-

[24] Hendi Subendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) edisi ke 1, cet ke 2, hal 26

cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari[25].

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh atau dicicil sementara pembayaran dilakukan tunai.

3) Istishna

Istishna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati di awal, namun pembayaran dilakukan secara tangguh atau dicicil. Sebagai ketentuan umum, spesifikasi barang yang dipesan harus jelas seperti tentang jenis, ukuran, jumlah dan lain sebagainya. Harga jual yang telah disepakati harus disepakati, harus dicantumkan dalam akad atau perjanjian istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

4) Ijarah

Pembiayaan yang berdasarkan akad ijarah menempatkan koperasi selaku pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir). Pada fikih klasik koperasi harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah. Pada umumnya koperasi tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi.

[25] Antonio Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani) hal 46

5) Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad atau perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak yaitu antara pemilik modal /shabib al maal dengan pengusaha/pelaksana usaha, dengan suatu pembagian keuntungan. Bentuk ini mengharuskan pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan (100%) dan pengusaha harus melakukan pengelolaan atasa usaha tersebut. Pengusaha sebagai orang yang dipercaya menjalankan usaha harus memiliki keahlian untuk menjalankan usaha dengan cara-cara yang halal dan tidak melanggar hukum untuk menciptakan laba yang optimal. Disamping itu ia harus bertindak hati-hati dan bertanggungjawab atas setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukannya[26]

6) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (investor) dengan pelaksana usaha untuk membiayai satu jenis uasaha yang disepakati. Dalam kerja sama ini pemiliki modal, pemilik hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menarik haknya dalam manajemen atau pengelolaan usaha/proyek.

Pembiayaan musyarakah dilandasi adanya kehendak dari para pihak yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha dalam rangka memperoleh keuntungan. Keuntungan dari hasil usaha

[26] Firdaus Rachmat dan Ariyanti Maya, *Pengantar Teori Moneter*, CV.Alfabeta cet 2011, hal 224

bersama ini dapat dibagikan secara proposional berdasarkan penyertaan modal masing-masing atau menurut nisbah tertentu diantara mereka sesuai dengan kesempatan bersama. Demikian juga apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka pembebananya biasa dibagi menurut besarnya penyertaan modal masing-masing atau menurut kesempatan bersama.

7) Gadai (Ar Rahn)

Gadai atau ar rahn adalah menahan harta yang dimiliki sipeminjam yang bernilai ekonomis, sebagi jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad rahn dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[27]

2.5 Literatur Review

Penelitian Variyetmi Wira, Gustati tentang Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Kota Padang hasil penelitian menunjukkan KJKS merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah Kota Padang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan bekerjasama langsung bersama masyarakat. KJKS diharapkan sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat Kelurahan yang

[27] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Remaja Rosdakarya : Bandung, 2016, hlm. 189-191.

miskin. Penyaluran dana kepada anggotanya menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan melalui prinsip-prinsip kemitraan. [28]

Penelitian Pristiyanto, Mochammad Hasjim Bintoro dan Tjokro Soekarno tentang Strategi Pengembangan Koperasi Jasa keuangan Syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang hasil penelitian menunjukkan Dengan aspek kemampuan pegembangan usaha yang dimiliki KJKS mampu mengembangkan usahanya yang dibuktikan dengan terjadi perkembangan selama periode 2008-2011. [29]

Penelitian Ali Sakti Hamonangan Nasution, Paidi Hidayat tentang Analisis Strategi Pengembangan Koperasi di Kota Medan dengan Metode Analisis SWOT dan Analytical Hierarchy Process (AHP) dari hasil analisis hierarki proses, maka didapatkan strategi pengembangan koperasi di kota Medan yang utama adalah dengan peningkatan produksi koperasi baik secara kuantitas maupun kualitas dan dari hasil analisis SWOT diperoleh Strategi pengembangan koperasi yaitu peningkatan produksi, peningkatan SDM koperasi, peranan pemerintah, perbaikan manajemen koperasi, kerjasama dengan badan usaha lain, dan efisiensi harga produk yang dihasilkan koperasi.[30]

---

[28] Variyetmi Wira dan Gustati, Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Rangka Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Di Kota Padang, Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, ISBN: 978-602-17129-5-5

[29] Pristiyanto, Mochammad Hasjim Bintoro dan Tjokro Soekarno, *Strategi Pengembangan Koperasi Jasa keuangan Syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan TanjungsarimSumedang*, Jurnalmpi, No.1 Vol, 8, 2013

[30] Ali Sakti Hamonangan Nasution dan Paidi Hidayat, *Analisis Strategi Pengembangan Koperasi di Kota Medan dengan Metode Analisis SWOT dan Analytical Hierarchy Process (AHP)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, No.7, Vol.2, 2014

Penelitian Testru Hendra tentang Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah hasil penelitian menunjukkan sebenarnya konsep yang diaplikasikan pada koperasi sejalan dengan konsep yang diajarkan Islam, yaitu bertujuan kerjasama antara anggota dengan tujuan kesejahteraan anggotanya dan terlihat jelas bahwa koperasi memihak kepada ekonomi kerakyatan. Apabila ekonomi syariah berkembang dan dapat dilaksanakan secara konsisten, dengan berpedoman pada konsep ekonomi syariah; tauhid, *rububiyah*, khilafah dan tazkiyah maka pemberdayaan ekonomi umat Islam dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat serta keadilan ekonomi dapat diwujudkan.[31]

Penelitian erman tentang Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Syariah di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang hasil penelitian menunjukkan Standar kompetensi yang ditetapkan oleh BMT taqwa Muhammadiyah padang untuk kompetensi operasionalnya adalah bahwa setiap manajer yang mengelola harus memiliki visi membagun ekonomi pengusaha kecil produksi supaya mendapatkan kesejahteraan dan kemudahan dalam menjalankan usaha dan semua yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas harus memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah karena salah satu tujuan keberadaan BMT ini adalah menyuburkan jual beli dan menghabiskan perekonomian yang memakai sistim riba.[32]

---

[31] Testru Hendra, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), No.1, Vol.1, 2016

[32] Erman, *Standar Kompetensi Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Syariah Di BMT Taqwa Muhammadiyah Padang*, Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, No. 2, Vol.2, 2017.

Penelitian Widya Fitriana tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi Dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usaha tani di Sumatera Barat (Studi Kasus: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) hasil penelitian menunjukkan Meski eksistensi KJKS BMT ditengah masyarakat desa khususnya petani mulai diminati masyarakat dan bahkan mengalami pertumbuhan yang positif, namun untuk pembiayaan usahatani ternyata *credit share* yang diberikan KJKS BMT masih sangat kecil yakni hanya kurang dari 5%. Sektor perdagangan dan UKM masih menjadi prioritas terbesar dari kredit yang dikucurkan BMT. [33]

Penelitian Winda Hartika tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Manfaat Koperasi Dan Motivasi Berkoperasi Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Syariah Bmt El-Ikhwanusshafa Gunung Pangilun Padang menunjukkan bahwa Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggota pada koperasi BMT EL-Ikhwanusshafa, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara manfaat koperasi terhadap partisipasi anggota pada koperasi BMT EL-Ikhwanusshafa, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota pada koperasi BMT EL-Ikhwanusshafa, terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kualitas pelayanan, manfaat dan motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota koperasi BMT EL-Ikhwanusshafa. [34]

---

[33] Widya Fitriana, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi Dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usahatani Di Sumatera Barat (Studi Kasus: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Agribisnis Indonesia (Vol 4 No 2, Desember 2016); Halaman 149-162.

[34] Winda Hartika, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Manfaat Koperasi Dan Motivasi Berkoperasi Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Syariah Bmt El-Ikhwanusshafa*

Penelitian Desmailafrita tentang Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) di Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan hasil penelitian menunjukkan ada 2 faktor yang menjadi penyebab tidak aktifnya koperasi yaitu faktor internal dan ekternal. Adapun faktor internalnya yaitu: 1) Sanksi yang tidak tegas. Ketidak tegasan juga dibuktikan dengan tidak adanya sanksi bagi jaminan anggota yang tidak membayar karena ekonomi moral 2) Anggota yang tidak membayar cicilan, banyak dari anggota koperasi yang tidak membayar cicilannya karena tidak mendapatkan keuntungan dari usaha, didukung dengan kondisi ekonomi yang baik sehingga anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman. 3) kurangnya kerja sama antara pengurus dan pengawas dengan pihak pengelola. Hubungan antara pengawas dan pengurus mempunyai peranan yang penting dengan pihak pengelola KJKS, tanpa kerja sama yang bagus antara pihak tersebut, akan menjadi masalah dalam perkembangan KJKS itu sendiri karena masingmasing pihak tersebut mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap KJKS. Adapun faktor ekternalnya yaitu : 1)kurangnya pembinaan keterampilan bagi pihak pengelola. selama KJKS ini aktif pelatihan hanya pernah dilakukan 1X padahal pihak oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas Koperindag untuk pelatihan. 2)keterbatasan tenaga penyuluh koperasi. [35]

Penelitian Mursal tentang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal *"Tungku Tigo Sajarangan"*

Gunung Pangilun Padang, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Pgri Sumatera Barat Padang

[35] Desmailafrita, *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Di Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan*, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Pgri Sumatera Barat Padang

menunjukkan Percepatan perkembangan LKMS di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran *Tungku Tigo Sajarangan*, setidak-tidaknya melalui dua program kerja sama. *Pertama*, bekerja sama dengan berbagai institusi dan organisasi keagamaan. *Kedua*, bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menerbitkan himbauan dan aturan memperkuat keberadaan LKMS.[36]

Penelitian Variyetmi Wira, Gustati tentang Peranan Pengetahuan Dalam Peningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Survey Pada Anggota KSPPS Kapalo Koto dan Lambuang Bukik) menunjukkan salah satu program pemerintah Kota Padang dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) disetiap kelurahan. Untuk pengembangan kelembagaan KSPPS diperlukan peningkatan partisipasi anggota yang lebih besar, serta diperlukan peranan yang lebih optimal dari anggota, pengelola, dan pengurus.

Penelitian Rozalinda tentang Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang hasil penelitian menunjukkan Masyarakat sampai hari ini masih menggunakan jasa rentenir dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Hal ini disebabkan karena: Pertama, kebutuhan untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kedua, proses pinjamannya cepat, prosedurnya mudah dan jangka waktu pelunasan relatif singkat. Ketiga, sulitnya mengakses lembaga keuangan termasuk

[36]Mursal, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Sumatera Barat Berbasis Kearifan Lokal *"Tungku Tigo Sajarangan", Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016: 108-124*

BMT. Keempat, kurangnya sosialisasi tentang BMT. Kelima, rendahnya kesadaran pengamalan ajaran agama dalam masalah keharaman riba. Sementara itu, BMT Taqwa Muhammadiyah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mempunyai misi membebaskan masyarakat dari ekonomi ribawi belum menunjukkan peran yang signifikan, karena lembaga ini belum bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan pedagang kecil terhadap permodalan mereka. [37]

Penelitian Wiwid Indragevi tentang Perkembangan Koperasi Remaja Makmur Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 1981-2012 hasil penelitian menunjukkan perkembangan dapat dilihat dalam masa berdiri dan tumbuh sebagai koperasi primer koperasi gabungan periode berkembeng menuju koperasi mandiri. Dampak kehadiran Koperasi Unit Desa Remaja Makmur terhadap kehidupan sosial ekonomi dan budaya bahwasanya Koperasi Unit Desa Remaja Makmur sangat berperan positif dalam kehidupan masyarakat Koto Laweh, seperti dibidang kesehatan Koperasi Unit Desa memfasilitasi masyarakat dengan ambulan serta mobil jenazah. Peran Koperasi Unit Desa dalam ekonomi membantu mengurangi pengangguran dengan cara mempekerjakan anak dari anggota Koperasi Unit Desa di unit-uni usaha Koperasi Unit Desa. [38]

Penelitian Irda Rosita Firman Surya Eliyanora tentang Administrasi Keuangan untuk Baitul Mal wat Tamwil (BMT) hasil penelitian menunjukkan Dengan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi administrasi keuangan

[37] Rozalinda, *Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang*, Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2013: 513-533

[38] Wiwid Indragevi, *Perkembangan Koperasi Remaja Makmur Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Tahun 1981-2012,* Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Kependidikan (Stkip) Pgri Sumatera Barat Padang

berbasis web, BMT dapat melaksanakan operasional dengan lebih baik. Pengendalian administrasi pinjaman menjadi lebih baik karena kemungkinan pengajuan pinjaman baru oleh nasabah yang belum melunasi pinjaman dapat dicegah. Petugas administrasi dapat dengan mudah menyelesaikan administrasi pembayaran cicilan setelah menerima seluruh transaksi pembayaran dengan mengisi lembar laporan penagihan pinjaman. Dengan semakin baiknya kualitas operasional administrasi pinjaman BMT, diharapkan pelayanan semakin baik dan dapat membantu memperlancar roda perekonomian masyarakat kecil. [39]

Penelitian Rizal tentang Peran Perempuan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Tanah Datar hasil penelitian menunjukkan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut termasuk pada kategori dominan, ini juga didukung oleh latar belakang pendirian lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tanah Datar banyak yang diprakarsai langsung oleh para perempuan, dan para perempuan-perempuan tersebut juga langsung menjadi menejer pada lembaga keuangan mikro syariah tersebut, sehingga mereka lebih banyak tahu dan terlibat dalam pengembangan lembaga keuangan tersebut dibandingkan dengan pengurus. [40]

Penelitian Ahmad Wira & Septia tentang Potensi Pendirian Bmt Di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat hasil penelitian menunjukkan hasil dari analisis SWOT Penilaian terhadap Faktor Internal kekuatan dan

[39] Irda Rosita, dkk, Administrasi Keuangan untuk Baitul Mal wat Tamwil (BMT), al Akuntansi & Manajemen Vol 10 No.1Juni 2015. ISSN 1858-3687 hal 1-12

[40]Rizal, *Peran Perempuan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Tanah Datar*, HUMAN FALAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014

kelemahan yang dimiliki oleh BMT secara umum menunjukkan hasil yang positif yaitu terdapat selisih antara kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BMT sebesar 1 Sedangkan dari faktor eksternal diketahui bahwa terdapat selisih total penilaian antara peluang dan ancaman yaitu sebesar 0,77. Sehingga dapat diketahui dari matriks kuadran SWOT bahwa posisi BMT berada pada kuadran I. Posisi ini menandakan bahwa BMT yang akan didirikan mempunyai kekuatan dan berpeluang. Sehingga sangat memungkinkan untuk mendirikan BMT di tempat penelitian. [41]

Penelitian Dewi Sartika, Fitrah Mulyanib tentang Analisis Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT hasil penelitian menunjukkan Untuk meningkatkan kinerja finansial dapat dilakukan dengan upaya peningkatan aset yang bersumber dari masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan jumlah penghimpunan dana (*founding*) dalam bentuk simpanan/tabungan, karena penghimpunan dana masyarakat ini merupakan sumber dana murah yang sangat efektif dalam meningkatkan aset KJKS BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Upaya lainnya bisa bersumber dari pembiayaan dari pihak ketiga. Program ini sudah memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin, peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan mutu sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan, peningkatan sarana/prasarana

[41] Ahmad Wira Dan Septia, *Potensi Pendirian Bmt Di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat,* Juris Vol. 14, No 1, 2015

kelurahan, pengembangan usaha masyarakat kelurahan, dan penguatan kelembagaan KJKS BMT dan kelembagaan lainnya. [42]

Penelitian Khairanil Wasilah tentang Pembiayaan Syariah Dan Pertumbuhan Umkm Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus: Kjks Bmt Al Hijrah) hasil penelitian menunjukkan jumlah pembiayaan, lama usaha, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhdap pertumbuhan UMKM. [43]

Penelitian Yosi Ananda tentang Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salimah Payakumbuh terhadap Pemberdayaan Ekonomi perempuan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah hasil penelitian menunjukkan BMT Salimah Payakumbuh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan pada umumnya sesuai prinsip ekonomi syariah, karena dalam menghimpun dana BMT Salimah Payakumbuh menggunakan Akad wadiah yang sesuai dengan syariat, dalam penyaluran dana akad – akad pembiayaan mereka salurkan kepada nasabah pembiayaan sesuai dengan syariat islam, yaitu dengan mengunakan nisbah bagi hasil, tidak dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, didasari atas prinsip tolong menolong dan keadilan sosial, serta BMT telah berperan dalam menjauhkan anggota dari praktek Ekonomi non Syariah dan rentenir, namun masih ada yang belum sesuai dengan ekonomi syariah seperti dalam perannya melepaskan ketergantungan masyarakat dari rentenir masih ada anggota yang meminjam ke rentenir setelah mendapatkan

[42] Dewi Sartika, Fitrah Mulyanib, Analisis Kinerja Finansial dan Nonfinansial Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT, *Journal of Applied Accounting and Taxation 2 (2) 165-177*

[43] Khairanil Wasilah, *Pembiayaan Syariah Dan Pertumbuhan Umkm Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus: Kjks Bmt Al Hijrah),* Skripsi, Universitas Andalas Padang

pembiayaan dan dalam perannya menyejahterahkan dan meningkatkan ekonomi, masih ada anggota yang belum sejahtera ekonominya. [44]

Penelitian Muhammad dan Ilham Suardi tentang Analisis Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wattamwil* Sebagai Sumber Permodalan Usaha Mikro Pada Kjks Bmt Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang hasil penelitian menunjukkan KJKS BMT Padang Besi menjalankan lima kegiatan dalam operasionalnya berdasarkan aturan Standar Operasional Produksi (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) KJKS BMT Kota Padang. KJKS BMT Padang Besi menerapkan sistim tanggung renteng dalam pembiayaan sebagai ganti agunan yang biasa digunakan oleh lembaga keuangan konvensional. KJKS BMT Padang Besi juga melakukan pengawasan penggunaan dana pembiayaan, dan menerapkan sanksi sosial kepada anggota yang macet dalam pengembalian dana pembiayaan. [45]

Penelitian Syafrizal Chan tentang Rating Koperasi Sumatera Barat (Studi Kasus Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Solok) hasil penelitian menunjukkan Koperasi yang mempunyai kinerja usaha kurang baik, dikarenakan manajemennya kurang memahami bagaimana manajemen keuangan, sehingga kurang mempedulikan struktur permodalan, seperti perbandingan modal sendiri

[44] Yosi Ananda, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Salimah Payakumbuh terhadap Pemberdayaan Ekonomi perempuan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Universitas Andalas Padang

[45] Muhammad, Ilham Suardi, *Analisis Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Sebagai Sumber Permodalan Usaha Mikro Pada Kjks Bmt Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*

dengan modal pinjaman, perbandingan aktiva dengan pasiva, perbandingan omset dengan bad debt, likuiditas, solvabilitas, dan frofitabilitas badan usaha. [46]

Penelitian Ferline Ariesta, Yolamalinda tentang Pengaruh Jumlah Anggota Dan Simpanan Anggota Terhadap Peningkatansisa Hasil Usaha (Shu) Pada Pkp-Ri (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Propinsi Sumatera Barat hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada PKP-RI Propinsi Sumatera Barat yaitu 1) jumlah anggota dan simpanan anggota, 2) jumlah anggota, simpanan anggota, dan penjualan berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan SHU PKP-RI Propinsi Sumatera Barat, dan 3) diantara jumlah anggota, simpanan anggota, dan penjualan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan SHU PKP-RI Propinsi Sumatera Barat adalah simpanan anggota, yaitu diperoleh thitung sebesar 4,548. [47]

Penelitian Rifqul Afif tentang Pontensi Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Rsud Prof. Dr. M.A Hanafiah Sm Batusangkar Dengan Menggunakan analisis Swot[48] hasil penelitian menunjukkan Hasil analisis SWOT terdapat 9 alternatif strategi, sebagai berikut: 1) Meningkatkan modal unit usaha terutama usaha simpan pinjam, 2) Memanfaatkan legalitas usaha untuk menjalin kerjasama sehubungan dengan Undang-undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, 3) Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah maupun swasta, 4) Adakan

[46] Syafrizal Chan, *Rating Koperasi Sumatera Barat (Studi Kasus Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Solok*, Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Volume 1, Nomor 2, September 2012

[47] Ferline Ariesta, Yolamalinda, *Pengaruh Jumlah Anggota Dan Simpanan Anggota Terhadap Peningkatansisa Hasil Usaha (Shu) Pada Pkp-Ri (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Propinsi Sumatera Barat*, Journal of Economic and Economic Education Vol.2 No.2 (116 - 125)

[48] Rifqul Afif, Pontensi Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah Rsud Prof. Dr. M.A Hanafiah Sm Batusangkar Dengan Menggunakan Analisis Swot, STES Manna Wa Salwa

pelatihan sesuai dengan kebutuhan, 5) Selalu berkoordinasi dengan Pengawas, Pengurus, dan karyawan, 6) Melakukan pembaharuan dalam hal unit usaha dan pelayanan agar lebih unggul dari pesaing, 7) Pembenahan kinerja Pengawas, Pengurus, dan Karyawan untuk langkah ke depan mengenai kemajuan dan kemunduran koperasi, 8) Meningkatkan kulialitas kemampuan SDM tentang akad-akad syariah, dan 9) Pemanfaatan teknologi untuk pembukuan dan lain-lain.

Alternatif strategi dengan nilai TAS tertinggi merupakan strategi yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu oleh Koperasi Pengawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar. Hasil dari tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai TAS tertinggi adalah pembenahan kinerja Pengawas, Pengurus, dan Karyawan untuk langkah ke depan mengenai kemajuan dan kemunduran koperasi.

Dari penelusuran literatur review tentang koperasi syariah dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat berharap agar koperasi Syariah berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan menjauhkan masyarakat dari rentenir. Dibalik keberhasilan pengembangan koperasi tentu harus terdapat berbagai upaya untuk mengembangkannya seperti bekerjasama dengan masyarakat, pengurus atau karyawan. Pengurus koperasi juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang koperasi syariah sehingga proses transaksi simpan pinjam sesuai dengan syariah. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan koperasi ini terkait tentang peraturan dan pengawasan.

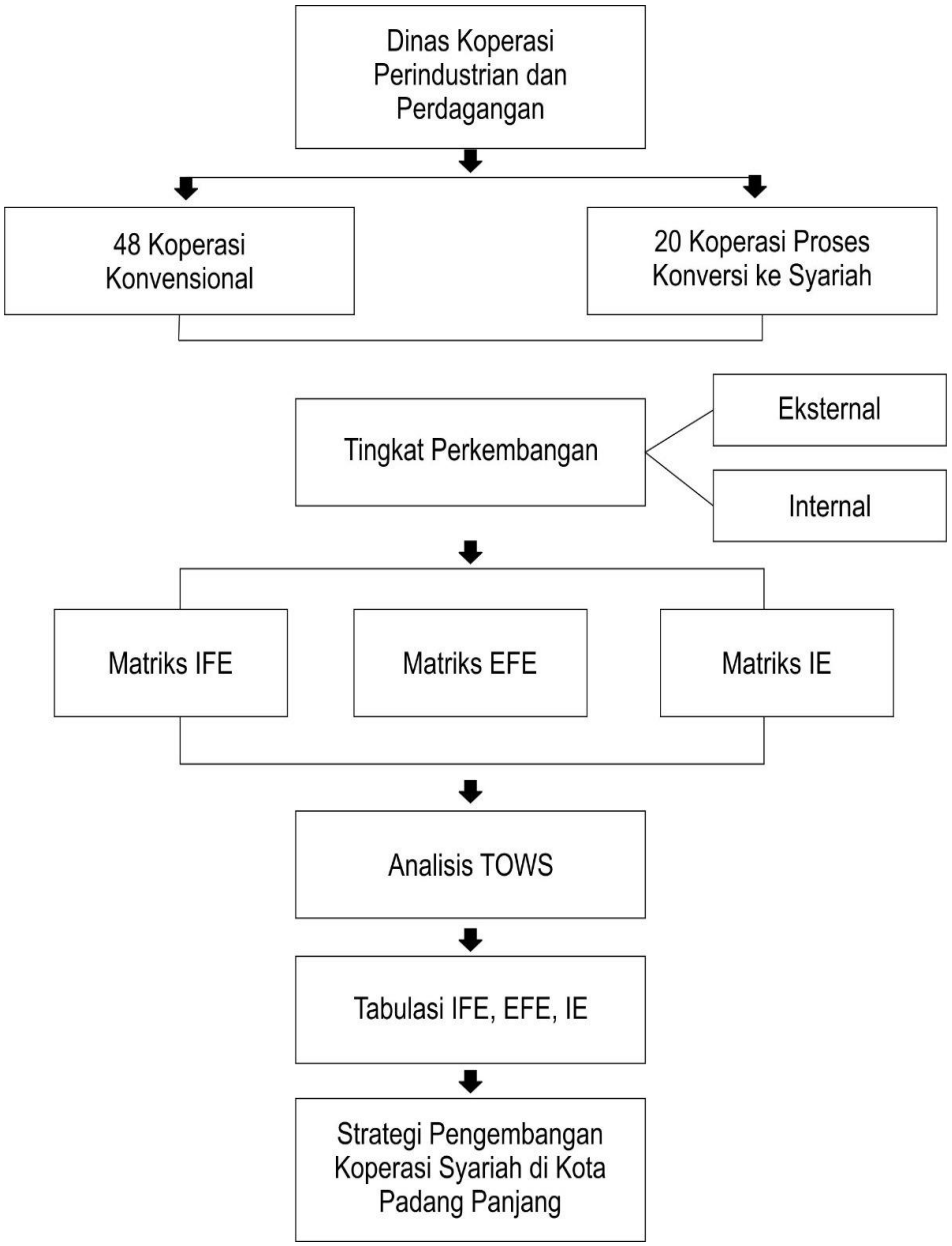
Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang koperasi syariah, dan kebanyakan dari

penelitian tersebut menggunakan analisis SWOT. Perbedaan penelitiannya yaitu penulis melakukan penelitian strategi pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang menggunakan analisis TOWS. Dimana belum ada peneletian terdahulu membahas tentang strategi pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang, padahal sangat berpotensi untuk pengembangan di kota Padang Panjang.

2.6 Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah, dengan melihat kondisi Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang sangat berpotensi untuk perkembangan lembaga keuangan syariah kerena memiliki julukan kota Serambi Mekkah, memiliki banyak sekolah Islam seperti Pesantren, Tsanawiah dan Madrasah Aliyah, serta melihat dukungan pemerintah kota Padang Panjang untuk terbentuknya koperasi syariah. Dengan melihat hal tersebut maka koperasi syariah mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan saat ini. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan dalam kerangka pemikiran dalam penelitian, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat ada 48 koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, di antara koperasi tersebut ada 20 koperasi yang proses konversi ke koperasi syariah. Untuk mengetahui rumusan alternatif strategi pengembangna koperasi syariah di Kota

Padang Panjang, maka terlebih dahulu dilihat tingkat perkembangan koperasi syariah tersebut baik dari faktor eksternal maupun internal. Setelah mendapatkan faktor eksternal dan internal selanjutnya diposisikan pada matriks IFE, EFE dan IE. Setelah mendapatkan skor dari matriks IE, EFE dan IE, langkah selanjutnya menggunakan analisis TOWS. Untuk mendapatkan prioritas strategi maka dilakukan tabulasi dari hasil IE, EFE dan IE menggunakan QSPM. Dari hasil tabulasi tersebut maka dapat dilihat strategi pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

2.7 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran (mixed methodology). Mixed method adalah metodologi yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam methodology (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian.[49]

Metode kuantitatif di gunakan untuk menganalisis potensi pengembangan koperasi syariah di kota Padang Panjang dengan mencari keterangan atau persepi pengelola koperasi proses konversi kekoperasi syariah. Sementara metode kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan dari kebijakan pemerintah Padang Panjang terhadap pengembangan koperasi syariah. Cakupan/besaran sumber data yang dijadikan sebagai subyek penelitian hanya sampel yang dianggap representatif. Sedangkan metode Menurut Sugiyono[50] dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka.

2.8 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang Panjang dan dilakukan kepada seluruh koperasi yang konversi, dengan jumlah 20 koperasi.

[49] Abbas Tashakkori, Mixed Methodologi, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010). H.222

[50] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. (Bandung:Alfabeta, 2012) Hal -23

2.9 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan *(mixed method*) yaitu kuantitatif dan kualitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka *(ordinal*). Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari sumber data tanpa perantara, yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dan wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner kepada Pengurus Koperasi yang proses konversi syariah (20 Orang) dan wawancara langsung dengan Kabid Koperasi UMKM Padang Panjang dan pendamping percepatan Koperasi Syariah di kota Padang Panjang. Data primer yang diharapkan dari wawancara yaitu berupa data dan informasi mengenai permasalah yang penulis teliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan termasuk majalah, jurnal, dan lembaga lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

akan diteliti.[51] Penulis memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip yang mendukung dalam penelitian, seperti profil kota padang panjang, perkembangan koperasi, SK dan program kerja dari dinas koperasi UMKM Padang Panjang.

2.10 Teknik penentuan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.[52] Pemanfaatan informasi bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat, banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya penggulangan data. Subjek dan informan dalam penelitian yang dimaksud adalah informan peneliti yang berfungsi untuk menjaring sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi penentuan prospek koperasi syariah di kota Padang Panjang.[53] Pada penelitian ini informan yang dijadikan oleh peneliti adalah Kabid Koperasi UMKM Padang Panjang, Pengurus Koperasi yang proses konversi syariah dan pendamping percepatan Koperasi Syariah di Padang Panjang.

[51] Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.237

[52] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2004), hal 15

[53] Bungin, Burhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada,2001), hal 25

2.11 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

a. **Wawancara**

Wawancara adalah metode suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan cara Tanya jawab langsung dengan kabid koperasi UMKM Padang Panjang, Pengurus Koperasi yang proses konversi syariah dan pendamping percepatan Koperasi Syariah di Padang Panjang. Yang mana wawancara tersebut mengenai peluang dan dukungan dari pemerintah padang panjang beserta para pengurus koperasi tentang koperasi syariah di padang panjang kedepan.

b. **Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan pencatatan secara sistematik terhadap gejala-gejala yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Observasi digunakan dalam teknik kualitatif karena suatu objek hanya dapat diungkap datanya apabila peneliti menyaksikan langsung dan terlibat dalam proses yang dilakukan subjek penelitian.[54] Dalam penelitian ini penulis terlibat langsung bersama subjek dengan cara ikut dalam kegiatan, menyaksikan, mendengarkan dan mengamati setiap proses yang dilakukan

[54] Jam'ah Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 107

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.[55] Penyebaran kuesioner sebanyak 20 responden kepada pengurus koperasi proses konversi syariah.

d. Do**kumentasi**

Dokumentasi adalah melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen ini akan peneliti minta kepada Kabid koperasi UMKM Padang Panjang, data yang peneliti butuhkan yaitu data-data yang berkaitan dengan koperasi di Padang Panjang dan program kerja dari pemerintahan Padang Panjang dalam mendukung adanya koperasi syariah dikota padang panjang.

2.12 Teknik Analisa Data

Analisis data pertama yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mengunakan data hasil wawancara mendalam dan kuisioner, hasil data ini dianalisis dengan menggunakan analisis Matrik EFE, IFE, TOWS (Threathened, Opportunity Weakness, dan strength) dan QSP. Analisis data kedua yaitu analisis kuantitatif yaitu melakukan tabulasi dari hasil perhitungan atas penilaian dan pembobotan atas IFE, EFE, dan IE.

[55] Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,…h.412

Dengan menggunakan dua teknik analisis diharapkan dapat mencapai hasil dan rekomendasi yang optimal. Sehingga dari analisis data di keluarkan sebuah strategi dan masukan untuk pengembangannya.

Menurut Hermawan Kartajaya, dkk Kenapa TOWS, bukannya SWOT seperti yang biasa kita dengar. Penjelasannya sangat fundamental, karena analisis dimulai dengan kajian terhadap faktor-faktor eksternal dengan melakukan analisis threat-opportunity, baru kemudian diikuti dengan kajian kondisi internal perusahaan berupa strength-weakness. Urutan analisis semacam ini dilandasi oleh adanya kenyataan bahwa di era 1990-an perubahan dan turbulensi lingkungan menjadi semakin penting, jauh melebihi perubahan lingkungan internal, karena itu kita harus mulai dari luar, baru ke dalam. Dengan kata lain kita menggunakan pendekatan outside-in, bukan inside-out.[56]

2.12.1 Matrik EFE (*Eksternal* Factor Evaluation*)*

Tabel 3.1

EFE (*Eksternal Factor Evaluation*)

Faktor Eksternal Kunci	Bobot	Peringkat	Skor Tertimbang
Peluang : faktor-faktor external yang mendukung untuk kemajuan pengembangan koperasi syariah	Bobot penilaian faktor-faktor peluang dan ancaman pengembangan koperasi syariah	Tingkat penilaian faktor-faktor peluang dan ancaman pengembangan koperasi syariah	Hasil perkalian bobot dengan peringkat
Ancaman : Faktor-faktor internal			

[56] Hermawan Kartajaya, dkk, Mark Plus On Strategy, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.72.

Yang menjadi hambatan untuk kemajuan pengembangan koperasi syariah			

Adapun tahap-tahap dalam penyusunan tabel EFE adalah sebagai berikut:

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi peluang serta ancaman pengembangan koperasi syariah pada kolom.
2. Memberi bobot setiap faktor dalam kolom 2, dengan kisaran dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting). Bobot mengindikasikan kepentingan relatif bahwa faktor itu sukses di industri perusahaan. Peluang biasanya menerima bobot yang lebih tinggi dari ancaman, namun ancaman dapat memperoleh bobot yang lebih tinggi jika sangat parah. Bobot yang sesuai dapat ditentukan dengan membandingkan pesaing yang sukses dan tidak sukses atau dengan mendiskusikan faktor itu dan memperoleh konsesus kelompok. Jumlah dari semua bobot terhadap faktor harus sama dengan 1,0.
3. Menghitung peringkat (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan peringkat 1 hingga 4 bagi setiap faktor eksternal kunci untuk mengindikasikan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini merespon terhadap faktor itu, dimana 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, dan 1 = buruk.
4. Berbasiskan industri. Penting untuk dicatat bahwa baik ancaman maupun kesempatan dapat diberi peringkat 1, 2, 3 atau 4.
5. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan peringkat pada kolom 3 untuk

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4.

6. Jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel untuk menentukan skor total.

2.12.2 Matrik IFE (*Internal* Factor Evaluation)

Tabel 3.2

IFE (*Internal Factor Evaluation)*

Faktor Internal Kunci	Bobot	Peringkat	Skor Tertimbang
Kekuatan: Faktor-faktor internal yang mendukung untuk kemajuan pengembangan koperasi syariah	Bobot penilaian faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pengembangan koperasi syariah.	Tingkat penilaian faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pengembangan koperasi syariah.	Hasil perkalian bobot dengan peringkat
Kelemahan: Faktor-faktor internal yang menjadi hambatan untuk kemajuan pengembangan koperasi syariah			

Sumber: David, Fred R. and Forest R, David (2015)

Tahap-tahap dalam menyusun tabel IFE adalah sebagai berikut:

1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan.
2. Tentukan bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (paling penting) untuk setiap faktor. Bobot diberikan untuk faktor yang mengindikasikan kepentingan relatif faktor agar berhasil diindustrinya. Tanpa memperhatikan apakah faktor kunci adalah kekuatan atau kelemahan, faktor-faktor yang dianggap memiliki efek terbesar pada

kinerja organisasi sebaiknya diberikan bobot tertinggi. Jumlah dari semua bobot harus sama dengan 1,0.

3. Berikan peringkat 1 hingga 4 pada setiap faktor untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut merepresentasikan kelemahan utama (peringkat=1) kelemahan kecil (peringkat=2) kekuatan kecil (peringkat=3), dan kekuatan utama (peringkat=4). Catatlah bahwa kekuatan harus menerima 3 atau 4 dan kelemahan harus menerima peringkat 1 dan 2. Peringkat tersebut berbasiskan perusahaan, sementara bobot dalam langkah 2 berbasis industri.
4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor tertimbang untuk setiap variabel.
5. Jumlahkan skor pembobotan (kolom 4), untuk memperoleh total skor. Pembobotan bagi organisasi yang bersangkutan. Total ini menunjukkan bagaimana organisasi tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya dengan organisasi lainnya dalam kelompok organisasi yang sama.

2.12.3 Matrik TOWS

TOWS singkatan dari *threats (Ancaman), opportunities (Peluang), weaknesses* (kelemahan) dan *strengths* (kekuatan). Kekuatan dan kelemahan merupakan analisis terhadap faktor internal atau lingkungan intern organisasi, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal atau berada pada lingkungan ekstern organisasi. Dengan TOWS dapat diketahui factor-faktor kunci

keberhasilan lembaga atau suatu kebijakan sehingga dapat dirancang program yang relevan atau dengan analisis ancaman dan peluang akan memungkinkan lembaga dapat menciptakan kegiatan yang dapat mengantisipasi ancaman.[57]

Tabel 3.3

Matrik TOWS

EFI EFE	Kekuatan (*Strength*)	Kelemahan (*Weakness*)
Peluang (*Opportunity*)	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Ancaman (*Threats*)	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: David (2015)

Terdapat definisi masing-masing mengenai kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), sebagai berikut:[58]

a. Kekuatan

Kekuatan merupakan sumber daya/kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan.

[57] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 209.

[58] Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.109-110.

b. Kelemahan

Kelemahan merupakan keterbatasan/kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif.

c. Peluang

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Identifikasi atas segmen pasar, perubahan dalam kondisi persaingan/regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli/pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan.

d. Ancaman

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya kekuatan tawar menawar dari pembeli/pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaruan peraturan, dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan.

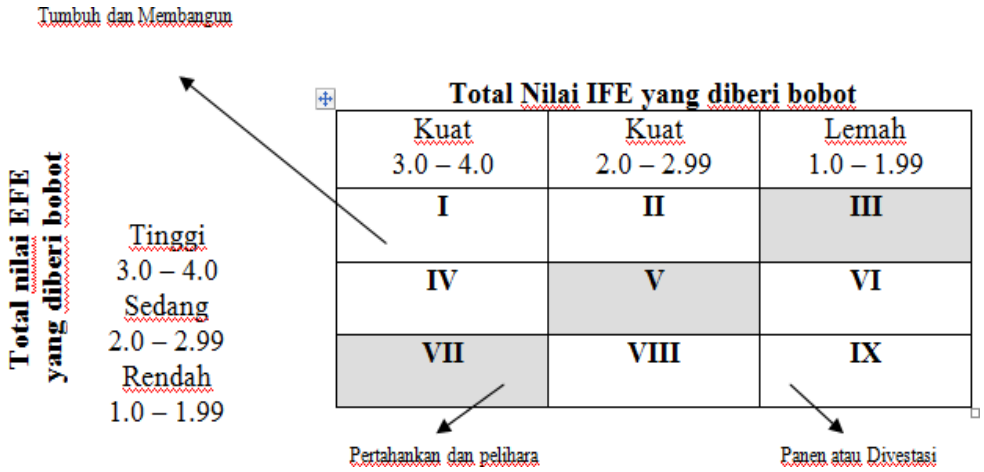
2.12.4 Matrik Internal Eksternal

Matriks IE memposisikan berbagai divisi atau suatu organisasi dalam tampilan Sembilan sel. Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh external yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis ditingkat korporat yang lebih

detail.[59]

Tabel 3.4

Matrik IE



Matrik IE didasarkan pada dua dimensi kunci: skor bobot IE total pada sumbu X dan skor bobot EFE total pada sumbu Y. Kita ingin kembali skor bobot pada topik bahasan yang lalu, skor bobot: IFE total 1,00 sampai 1,99 menunjukkan posisi internal lemah; 2,00 sampai 2,99 sedang; 3,00 sampai 4,00 adalah kuat. Skor tertimbang EFE dari 1,00 sampai 1,99 menunjukkan posisi eksternal rendah; 2,00 sampai 2,99 sedang; 3,00 sampai 4,00 adalah tinggi.

2.12.5 Quantitative Strategic *Planning Matrix* (QSPM)

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) yang membentuk tahap 3 (tiga) kerangka analisis formulasi strategi. Teknik ini secara objektif mengindikasikan strategi alternatif yang baik. QSPM menggunakan tahap input

[59] Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.95.

dari analisis tahap 1 (satu) dan mencocokkan hasil dari analisis tahap 2 (dua) untuk memutuskan secara objektif di antara berbagai strategi alternatif.

QSPM merupakan alat evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan *Key Success Factor* internal dan eksternal yang telah didefenisikan sebelumnya. Komponen-komponen utama dari QSPM terdiri dari *Key Factors*, *Strategi Alternatif, Weights, Attractiveness Score* dan *Sum Total Attractiveness Score*. Berikut langkah-langkah dalam penggunaan QSPM menurut David.

1. Membuat daftar kesempatan dan ancaman perusahaan, juga kelemahan serta kekuatan internal di kolom kiri QSPM.
2. Memasukkan bobot untuk setiap faktor kunci internal dan eksternal (*Key Success Factor*).
3. Identifikasi strategi-strategi yang dipertimbangkan
4. Menentukan skor daya tarik (*Attractiveness Score*), didefenisikan sebagai nilai numerik yang mengindikasikan daya tarik relatif dari setiap strategi dalam alternatif. Skor daya tarik (AS) ditentukan dengan menguji setiap faktor internal dan eksternal kunci (*Key Success Factor*) pada satu waktu, dan mengajukan pertanyaan "Apakah faktor ini mempengaruhi pilihan strategis yang dibuat?" jika jawaban untuk pertanyaan ini "Ya" maka strategi sebaiknya dibandingkan secara relatif untuk faktor kunci tersebut. Secara spesifik, AS sebaiknya diberikan dalam strategi untuk mengindikasikan daya tarik relatif dari satu strategi terhadap strategi lainnya, dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Kisaran untuk AS adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, 4 =

sangat menarik.

5. Hitung skor daya tarik total. *Total Attractiveness Score* (TAS) didefenisikan sebagai hasil dari perkalian bobot (langkah 2) dengan AS (langkah 4) di setiap baris. TAS mengindikasikan daya tarik relatif dari setiap strategi alternatif, mempertimbangkan hanya dampak faktor pembatas kesuksesan internal dan eksternal yang penting. Semakin tinggi TAS, semakin menarik alternatif strategi.
6. Menghitung jumlah skor daya tarik total. Tambahkan TAS dalam setiap kolom strategi QSPM. Jumlah skor daya tarik total (STAS) mengungkapkan strategi yang paling menarik dalam setiap perangkat alternatif. Skor yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Besarnya perbedaan STAS dalam seperangkat set alternatif strategies mengindikasikan keinginan relatif satu strategi dibandingkan strategi lain.

Pengolahan *Quantitative Strategic Planning Matrix* memerlukan intuisi dan analisis yang tajam. Berikut adalah contoh format QSPM:

Tabel 3.5
Quantitative Strategic Planning Matrix

Key Success Factor	Bobot	Alternatif Strategi			
		Strategi 1		Strategi 2	
		AS	TAS	AS	TAS
Opportunity					
Threats					
Strengths					
Weakness					
Total					

Sumber: David (2015)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada 20 Koperasi yang sedang proses konversi kekoperasi syariah yang ada di kota Padang Panjang. Koperasi ini mendapatkan program percepatan untuk konversi dari pemerintah kota Padang Panjang yang tertuang pada visi misi Wali Kota Padang Panjang. Sehingga dinas Koperindag sangat gencar untuk membantu proses percepatan tersebut dengan melakukan kerja sama dengan salah satu Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa. Kerjasama ini dituangkan pada MOU diantara kedua belah pihak, yang mana Perguruan Tinggi tersebut bertugas untuk mendampingi 20 Koperasi yang ditunjuk untuk melakukan konversi.

4.1.1 KSP Syariah ISI

KSP Syariah ISI beralamat di Jln Bahder Kompl ISI Guguk Malintang. Jumlah anggota sebanyak 317 orang. Badan hukum pertama no 1362/BH-XVII tanggal 4 November 1982. Koperasi ISI telah konversi dan mendapatkan badan hukum tahun 2014, Nomor 04/PAD/BH/III.14/III/2014 Tanggal 25 Maret 2014.

4.1.2 Kapontren Diniyah Putri

Beralamat di Jln Abdul Hamid Hakim No. 30 Kel Pasar Usang Kec Padang Panjang Barat. Anggota koperasi kapontren diniyah putri berjumlah 206 orang. Nomor badan hukum 2169/BH-XVII tanggal 11 Oktober 1994.

4.1.3 KPRI Serambi Mekah

KPRI Serambi Mekah beralamat di Jln ST Syahrir No 124 Kelurahan Silaing Bawah. Nomor badan hukum KPRI Serambi Mekah 1903/BH-XVII tanggal 6 Februari 2019. Jumlah anggota KPRI Serambi Mekah 140 orang.

4.1.4 KSU Sehati

KSU Sehati merupakan koperasi serba usaha yang beralamat di Jl Bagindo Azis Chan Kel Tanah Hitam. Ksu sehati telah mempunyai badan hukum No.39/BH/III.14/VIII Tanggal 28 Juni 2012. Anggota KSU Sehati berjumlah 157 orang.

4.1.5 KSU Amal Husna

KSU Amal Husna beralamat di Jl Abdullah Ahmad No 11 RT.4 Kelurahan pasar Usang. Mempunyai badan hukum yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2012 dengan nomor 38/BH/III.4//2012. Anggota KSU Amal Husna berjumlah 106 orang.

4.1.6 KPN SMP N 1

KPN SMP N I beralamat di Jln. Soedirman No.41 Kelurahan Balai-balai. Badan hukum No.1824/BH-XVII/1989 Tanggal 21 Februari 1989. Anggota KPN SMP N 1 berjumlah 53 orang.

4.1.7 KOPESDA

Kopesda beralamat di Jln Bundo Kandung Kel Malintang (SDN 04). KOPESDA telah memiliki badan hukum sejak 13 Juli 198 dengan nomor: 1754/BH-XVII. Anggota KOPESDA berjumlah 103 orang.

4.1.8 KPRI MAN Kotobaru

KPRI MAN Kotobaru beralamat di Jl Pendidikan No 1 Kom MAN Koto Baru. Nomor badan hukum KPRI MAN Kotobaru 2178/BH/XVI/1994 diterbitkan tanggal 15 Desember 1994. Anggota koperasi berjumlah 86 orang.

4.1.9 KPRI SMUN 2

KPRI SMUN2 beralamat di Jln Bundo Kandung No. 2 RT 008 Kel Malintang. Nomor badan hukum KPRI SMUN 2 yaitu 25/BH/DPPKP/III/2005 diterbitkan tanggal 07 Maret 2005. Anggota koperasi berjumlah 59 orang.

4.1.10 KOPKAR YARSI

KOPKAR Yarsi beralamat di Jln Sukarno Hatta No 23 Padang Panjang. Nomor badan hukum KOPKAR Yarsi yaitu 03/BH/KDK.3.12/XI/1998 diterbitkan tanggal 30 November 1998. Anggota koperasi berjumlah 185 orang.

4.1.11 KPRI RSUD

Beralamat di Jln Ahmad Dahlan No 05 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Anggota KPRI RSUD berjumlah 330 orang. Semua pengurus pada koperasi ini adalah dokter pada RSUD Padang Panjang. KPRI RSUD telah mempunyai badan hukum No.41/BH/KWK3/IX/95 Tanggal 27 September 1995.

4.1.12 KPRI SMPN 3

Beralamat di Jln Ahmad Yani No 03. Anggota KPRI SEDAR berjumlah 43 orang. KPRI Sedar mempunyai badan hukum sejak tanggal 09 Oktober 19889, Nomor 1861/BH-XVII

4.1.13 KPRI SMAN 1

KPRI SMAN 1 beralamat di jln ahmad yani No 09 Kelurahan Guguk Malintang. KPRI SMAN 1 memiliki anggota 70 orang. Selain memiliki usaha simpan pinjam, KPRI SMAN 1 juga memiiliki usaha penyediaan kebutuhan berdasarkan pesanan, pengadaan kebutuhan siswa baru (asrama), pengadaan pakaian seragam siswa baru dan pengelolaan simpan pinjam menuju pola syari'ah.

4.1.14 KPRI SEDAR

KPRI SEDAR merupakan koperasi pegawai Republik Indonesia yang beralamat di JL Bundo Kanduang kelurahan Guguk Malintang kecamatan Padang Panjang Timur. Anggota KPRI SEDAR berjumlah 137 orang. KPRI Sedar mempunyai badan hukum sejak tanggal 29 Oktober 1988, Nomor 1787/BH-XVII.

4.1.15 KPN SMPN 2

KPN SMPN 2 beralamat di Jln Sutan Syahrir Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat. Anggota KPN SMPN2 berjumlah 66 orang. Nomor badan hukum KPN SMPN2 yaitu 892/BHXVII Tanggal 31 Januari 1974.

4.1.16 KPN KOKANDIKO

Kokandiko merupakan koperasi pegawai negeri dinas pendidikan. Beralamat di Jln Bundo Kandung No 1 Kel Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. Anggota koperasi Kokandiko berjumlah 248 orang. KPN Kokandiko telah mempunyai badan hokum sejak 01 Juni 1983 no badan hukumnya 0898.A/BH-XVII.

4.1.17 KPRI SMKN 1

Beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No.70 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur. Jumlah anggota koperasi yaitu 66 orang. KPRI SMKN 1 memiliki badan hokum sejak 7 mei 1997, No badan hukumnya 415/PAD/KWK.3/V/1997.

4.1.18 KPRI SMPN 4

Beralamat di Jl Hos Cokroaminoto No 22. Jumlah anggota koperasi yaitu 66 orang. KPRI SMPN4 memiliki badan hukum sejak 14 Desember 1989, No badan hukumnya 1883/BH-XVII/1989

4.1.19 KPRI KOPRIDA DEPAG

KPRI Koprida merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kementerian Agama. Beralamat di Jl Urip Sumoharjo No 76 Kel Tanah Pak Lambik. Koperasi ini memiliki badan hukum sejak 09 April 1975, dengan no badan hukum1008/BH-XVII/1975. Anggota koperasi berjumlah 126 orang

4.1.20 KPRI MTSN

Beralamat di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Bukit Surungan. Jumlah anggota koperasi yaitu 66 orang. KPRI SMKN 1 memiliki badan hokum sejak 14 Juli 1990, No badan hukumnya 1937/BH-XVII

4.2 Profil Responden

Tabel 4.1

Profil Responden (Pengurus Koperasi Konveri ke Syariah)

Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Frekuensi (%)
1	Laki-laki	15	75
2	Perempuan	5	25
Total		20	100

Sumber: Data Primer 2019

Pada penelitian ini jumlah responden yang paling dominan yakni laki-laki dengan jumlah 15 responden atau 75%. Sedangkan jumlah responden yang paling sedikit adalah perempuan dengan jumlah 5 responden 25%

Tabel 4.2

Profil Responden berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Frekuensi %
1	SMA	1	5
2	D3 /D4	0	0
3	S1	19	95
4	S2	0	0
5	S3	0	0
Total		20	100

Sumber: Data Primer 2019

Pada penelitian ini jumlah responden yang paling dominan jumlahnya yakni tamatan S1 dengan jumlah 19 responden atau 95%. Sedangkan jumlah yang paling sedikit yakni tamatan D3/D4, S2, S3 dengan jumlah 0 atau 0%.

Tabel 4.3

Profil Responden berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Frekuensi (%)
1	< 25 tahun	0	0
2	26 - 35 tahun	0	0
3	36 - 45 tahun	3	15
4	> 45 tahun	17	85
Total		20	100

Sumber: Data Primer 2019

Pada penelitian ini jumlah responden paling dominan adalah umur >45 tahun dengan jumlah 17 responden atau 85%. Sedangkan jumlah responden yang paling sedikit adalah berusia <25 tahun, 26-35 tahun dengan jumlah 0 responden atau 0%.

4.3 Aspek-aspek yang dimiliki untuk Pengembangan Koperasi Syariah di kota Padang Panjang untuk Konversi ke Koperasi Syariah

4.3.1 Aspek Regulasi dan Dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Regulasi percepatan pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang berawal dari keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 516-451-2018 dan Keputusan Wali Kota Tentang

Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019 pada tanggal 1 Februari 2019. Ketua Tim percepatan ini yaitu Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang.[60]

Setelah dibentuk Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah pemerintah memberikan dukungan penuh, dan memberikan berbagai pelatihan tentang Koperasi Syariah kepada Pengawas dan Pengurus masing-masing koperasi. Pemerintah kota Padang Panjang melalui Dinas Koperindag juga membuat MOU dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa untuk melakukan pendampingan langsung kepada 20 koperasi yang akan konversi ke Koperasi Syariah.

4.3.2 Aspek Religiusitas

Dalam kehidupan sosial ada satu istilah yang akrab dibicarakan dan diyakini oleh manusia, yaitu agama (religi). Religiusitas berasal dari bahasa latin *relegare* yang berarti mengikat secara erat atau ikatan kebersamaan. Religiusitas adalah sebuah ekspresi spritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, hukum yang berlaku dan ritual. Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu didalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal. Religiusitas adalah seberapa

[60] Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2019

mampu individu melaksanakan aspek keyakinan agama dalam kehidupan beribadah dan kehidupan sosial lainnya.[61]

Kota Padang Panjang dikenal dengan Kota Serambi Mekah, hal ini dikerenakan sebagian besar penduduk beragama islam. Dari data sensus penduduk yang dilaksanakan bulan Mei 2010 telah mencatat jumlah penduduk kota Padang Panjang sebanyak 47.008 jiwa.[62] Dan dari data badan pusat statistik dituliskan jumlah penduduk Kota Padang Panjang beragama islam 45.076, Kristen 268, Katolik 305, Hindu 4, Budha 45, lainnya 4, tidak ditanyakan 1.306, jumlah 47.008 Jiwa.[63]

Banyaknya jumlah penduduk beragama Islam di Kota Padang Panjang menunjukkan tingkat keyakinan beragama Islam sangat tinggi. Saat ini di Kota Padang Panjang terdapat 48 Koperasi dan 20 Koperasi diantaranya sedang proses konversi ke Koperasi Syariah.

4.4 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis deskriptif dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang sebagai berikut ini:

[61] Yolanda Hani Putriani, *Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Airlangga di Tinjau dari Aspek Religiusitas*, (Jurnal JESTT Vol.2 No.7 Juli 2015. Surabaya: Universitas Airlangga, 2015)

[62] Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, *Statistik Daerah Kota Padang Panjang 2018*, (Padang Panjang: CV. Adyta, 2018), h. 6.

[63] https://Sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=1374000000, diakses jam 22.00 15 Oktober 2019

Tabel 4.4

Analisis Deskriptif Dari Peluang Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang

NO	Eksternal Factor Evaluation (EFE)	Rating				Mean
		1	*2*	*3*	*4*	
PELUANG (OPPORTUNITIES)						
1	Adanya kebijakan pemerintah kota padang panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah	0	0	0	20	4
2	Perhatian koperindag kota Padang Panjang untuk pengembangan Koperasi Syariah	0	0	5	15	3.75
3	Komitmen masyarakat untuk menjalankan syariat islam	0	0	15	5	3.25
4	Adanya pendampingan dari lembaga pendidikan	0	0	10	10	3.5
5	Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat	0	0	19	1	3.05
6	Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor	0	0	19	1	3.05
7	Besarnya pelaku usaha mikro yang berminat terhadap layanan koperasi	0	2	18	0	2.9
8	Besarnya komitmen pemerintah kota sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah	0	0	2	18	3.9
9	Menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota	0	0	0	20	4

Sumber : Data Primer 2019

Pada penelitian ini dalam pernyataan peluang pada poin pertama yaitu adanya kebijakan pemerintah kota padang panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah responden yang sepakat sejumlah 20 responden memperoleh mean 4. Selanjutnya pada pernyataan Perhatian koperindag kota Padang Panjang untuk pengembangan Koperasi Syariah 5 responden menyatakan baik dan 15

responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,75. Selanjutnya pada pernyataan komitmen masyarakat untuk menjalankan syariat islam 15 menyatakan baik dan 5 menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,25. Selanjutnya pada pernyataan Adanya pendampingan dari lembaga pendidikan 10 responden menyatakan baik dan 10 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,5. Selanjutnya pada pernyataan Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat 19 responden menyatakan baik dan 1 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,05. Selanjutnya pada pernyataan Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor 19 responden menyatakan baik dan 1 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,05. Selanjutnya pada pernyataan besarnya pelaku usaha mikro yang berminat terhadap layanan koperasi 2 responden menyatakan cukup dan 18 responden menyatakan baik memperoleh mean 2,9. Selanjutnya pada pernyataan besarnya komitmen pemerintah kota sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah 2 responden menyatakan baik dan 18 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,9. Selanjutnya pada pernyataan Menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota responden yang sepakat sejumlah 20 responden memperoleh mean 4.

Tabel 4.5

Analisis Deskriptif Dari Ancaman Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang

NO	Eksternal Factor Evaluation (EFE)	Rating				Mean
		1	*2*	*3*	*4*	
ANCAMAN (THREATS)						
1	Persaingan dengan lembaga keuangan lain	5	15	0	0	1.75
2	Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis IT	0	4	11	0	2.05
3	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah	0	10	5	5	2.75
4	Lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah	0	0	20	0	3
5	Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan	0	5	15	0	2.75
6	Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan	0	2	18	0	2.9
7	Gaji anggota langsung di tarik oleh bank sehingga tidak bisa membayar cicilan pembiayaan	18	0	2	0	1.2

Sumber : Data Primer 2019

Pada penelitian ini dalam pernyataan ancaman pada poin pertama yakni persaingan dengan lembaga keuangan lain 15 responden menyatakan cukup dan 5 responden menyatakan kurang memperoleh mean 1,75. Selanjutnya pada pernyataan berkembangnya layanan produk perbankan berbasis IT 4 responden menyatakan kurang dan 11 responden menyatakan baik memperoleh mean 2,05. Selanjutnya pada pernyataan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah 10 responden menyatakan cukup, 5 responden menyatakan baik dan 5 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 2,75. Selanjutnya pada pernyataan lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah 20 responden menyatakan baik memperoleh mean 3. Selanjutnya

pada pernyataan besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan 5 responden menyatakan cukup dan 15 responden menyatakan baik memperoleh mean 2,75. Selanjutnya pada pernyataan pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan 2 responden menyatakan cukup dan 18 responden menyatakan baik memperoleh mean 2,9. Selanjutnya pada pernyataan gaji anggota langsung di tarik oleh bank sehingga tidak bisa membayar cicilan pembiayaan 18 responden menyatakan kurang dan 2 responden menyatakan baik memperoleh mean 1,2

Tabel 4.6

Analisis Deskriptif dari Kekuatan Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang

NO	Internal Factor Evaluation (IFE)	Rating				Skor
		1	2	3	4	
Kekuatan						
1	Adanya Pengesahan badan hukum koperasi	0	0	0	20	4
2	Lokasi Koperasi Strategis	0	0	3	17	3,85
3	Mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan	0	0	15	5	3,25
4	Pelayanan ramah dan tanggap	0	0	14	6	3,3
5	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	0	2	14	4	3,1
6	Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan	0	1	17	2	3,05
7	Adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi syariah	1	0	7	12	3,5
8	Pembinaaan dan pendidikan tentang koperasi syariah kepada anggota koperasi	1	0	17	2	3

Sumber: Data Primer 2019

Pada penelitian ini pada pernyataan kekuatan pertama yakni adanya pengesahan badan hukum koperasi banyak responden yang sepakat atau menyatakan sangat baik yakni sejumlah 20 responden memperoleh mean 4. Selanjutnya pada pernyataan lokasi koperasi Strategis 3 responden menyatakan baik dan 17 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,85. Selanjutnya pada pernyataan mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan, 15 responden menyatakan baik dan 5 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,25. Selanjutnya pada pernyataan pelayanan ramah dan tanggap 14 responden menyatakan baik dan 6 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,3. Selanjutnya pada pernyataan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 2 responden menyatakan cukup, 14 responden menyatakan baik dan 4 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,1. Selanjutnya pada pernyataan memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan 1 responden menyatakan cukup, 17 responden menyatakan baik dan 2 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,05. Selanjutnya pada pernyataan adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi syariah 1 responden menyatakan kurang, 7 responden menyatakan baik dan 12 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,5. Selanjutnya pada pernyataan pembinaaan dan pendidikan tentang koperasi syariah kepada anggota koperasi 1 responden menyatakan kurang, 17 responden menyatakan baik dan 2 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3.

Tabel 4.7

Analisis Deskriptif Kuantitatif dari Kelemahan Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang

No	Faktor Strategi Internal	Rating				Mean
		1	2	3	4	
KELEMAHAN (WEAKNESS)						
1	Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi	0	5	15	0	2.75
2	Besarnya pinjaman bermasalah	18	2	0	0	1.1
3	Kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan	0	3	17	0	2.85
4	Masih terbatasnya Unit Usaha Koperasi Syariah	15	0	5		1.5
5	Penerapan operasional manajemen dan prosedur yang longgar	0	0	17	3	3.15
6	Kurangnya pemahaman anggota tentang pembiayaan	0	4	16	0	2.8
7	Kurangnya minat anggota untuk menabung	2	6	12	0	2.5
8	Terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota	0	0	15	5	3.25

Sumber : Data Primer 2019

Pada penelitian ini dalam pernyataan kelemahan pada poin pertama yakni masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi responden yang menjawab cukup 5 dan baik 15 responden memperoleh mean 2,75. Selanjutnya pada pernyataan besarnya pinjaman bermasalah responden paling banyak mengungkapkan kurang yaitu sebanyak 18 responden dan 2 menyatakan cukup memperoleh mean 1,1. Selanjutnya pada pernyataan kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan 3 menyatakan cukup, 17 menyatakan baik

memperoleh mean 2,85. Selanjutnya pada pernyataan masih terbatasnya unit usaha Koperasi Syariah 15 responden menyatakan kurang alias tidak ada dan 5 menyatakan baik memperoleh mean 1,5. Selanjutnya pada pernyataan penerapan operasional manajemen dan prosedur yang longgar responden paling banyak yaitu 17 responden menyatakan baik dan 3 menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,15. Selanjutnya pada pernyataan kurangnya pemahaman anggota tentang pembiayaan yang menyatakan baik 16 responden dan 4 responden menyatakan cukup memperoleh mean 2,8. selanjutnya pada pernyataan. Selanjutnya pada pernyataan kurangnya minat anggota untuk menabung 2 responden, 6 menyatakan cukup dan 12 responden menyatakan baik memperoleh mean 2,5. Selanjutnya pada pernyataan terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota 15 responden menyatakan baik dan 5 responden menyatakan sangat baik memperoleh mean 3,25.

4.5 Analisis dan Hasil Pembahasan

4.5.1 Matriks EFE dan IFE

Pada tahapan ini berisi informasi mengenai input dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi dari peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Adapun cara menghitungnya sebagai berikut ini :

Tabel 4.8

Matrik EFE

NO	Eksternal Factor Evaluation (EFE)	Bobot	Rating	Skor
Peluang (Opportunities)				
1	Adanya kebijakan pemerintah kota padang panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah	0.10	4.00	0.40
2	Perhatian koperindag kota Padang Panjang untuk pengembangan Koperasi Syariah	0.09	3.75	0.34
3	Komitmen masyarakat untuk menjalankan syariat islam	0.09	3.25	0.29
4	Adanya pendampingan dari lembaga pendidikan	0.08	3.50	0.28
5	Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat	0.09	3.05	0.27
6	Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor	0.05	3.05	0.15
7	Besarnya pelaku usaha mikro yang berminat terhadap layanan koperasi	0.02	2.90	0.06
8	Besarnya komitmen pemerintah kota sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah	0.09	3.90	0.35
9	Menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota	0.09	4.00	0.36
Jumlah Faktor Peluang (**O**)		0.70		2.51
Ancaman (Threats)				
1	Persaingan dengan lembaga keuangan lain	0.04	1.75	0.07
2	Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis IT	0.02	2.05	0.04
3	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah	0.05	2.75	0.14

4	Lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah	0.05	3.00	0.15
5	Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan	0.04	2.75	0.11
6	Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan	0.05	2.90	0.15
7	Gaji anggota langsung di tarik oleh bank sehingga tidak bisa membayar cicilan pembiayaan	0.05	1.20	0.06
	Jumlah Faktor Ancaman (**T**)	0.30		0.71
Jumlah **(O + T)**		1.00		3.22

Pada penelitian ini pernyataan pada adanya kebijakan pemerintah kota padang panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah mendapatkan bobot 0,10 dengan rating 4.00 dan skor 0,40. Selanjutnya pada pernyataan perhatian koperindag kota Padang Panjang untuk pengembangan Koperasi Syariah mendapatkan bobot 0,09 dengan rating 3.75 dan skor 0,34. Selanjutnya pada pernyataan komitmen masyarakat untuk menjalankan syariat islam mendapatkan bobot 0,09 dengan rating 3.25 dan skor 0,29. Selanjutnya pada pernyataan Adanya pendampingan dari lembaga pendidikan mendapatkan bobot 0,08 dengan rating 3.50 dan skor 0,28. Selanjutnya pada pernyataan Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat mendapatkan bobot 0,09 dengan rating 3.05 dan skor 0,27. Selanjutnya pada pernyataan Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor mendapatkan bobot 0,05 dengan rating 3.05 dan skor 0,15. Selanjutnya pada pernyataan Besarnya pelaku usaha mikro yang berminat terhadap layanan koperasi mendapatkan bobot 0,02 dengan rating 2.90 dan skor 0,06. Selanjutnya pada pernyataan Besarnya komitmen pemerintah kota

sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah mendapatkan bobot 0,09 dengan rating 3.90 dan skor 0,35. Selanjutnya pada pernyataan Menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota mendapatkan bobot 0,09 dengan rating 4.00 dan skor 0,36.

Kemudian pada pernyataan ancaman tentang persaingan dengan lembaga keuangan lain mendapatkan bobot 0,04 dengan rating 1.75 dan skor 0,07. Selanjutnya pada pernyataan Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis IT mendapatkan bobot 0,02 dengan rating 2,05 dan skor 0,04. Selanjutnya pada pernyataan Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah mendapatkan bobot 0.05 dengan rating 2.75 dan skor 0.14. Selanjutnya pada pernyataan Lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah mendapatkan bobot 0.05 dengan rating 3.00 dan skor 0.15. Selanjutnya pada pernyataan Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan mendapatkan bobot 0.04 dengan rating 2.75 dan skor 0.11. Selanjutnya pada pernyataan Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan mendapatkan bobot 0.05 dengan rating 2.90 dan skor 0.15. Selanjutnya pada pernyataan Gaji anggota langsung di tarik oleh bank sehingga tidak bisa membayar cicilan pembiayaan mendapatkan bobot 0.05 dengan rating 1.20 dan skor 0.06.

Tabel 4.9

Matrik IFE

NO	Internal Factor Evaluation (IFE)	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				
1	Adanya Pengesahan badan hukum koperasi	0.07	4	0.28
2	Lokasi Koperasi Strategis	0.07	3.85	0.27
3	Mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan	0.10	3.25	0.33
4	Pelayanan ramah dan tanggap	0.09	3.3	0.30
5	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	0.08	3.1	0.25
6	Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan	0.06	3.05	0.19
7	Adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi syariah	0.13	3.5	0.44
8	Pembinaaan dan pendidikan tentang koperasi syariah kepada anggota koperasi	0.06	3	0.18
	Jumlah Faktor Kekuatan (**S**)	0.66		2.23
Weaknesess (Kelemahan)				
1	Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi	0.02	2.75	0.06
2	Besarnya pinjaman bermasalah	0.05	1.1	0.06
3	Kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan	0.07	2.85	0.20
4	Masih terbatasnya Unit Usaha Koperasi Syariah	0.01	1.5	0.02
5	Penerapan operasional manajemen dan prosedur yang longgar	0.01	3.15	0.03
6	Kurangnya pemahaman anggota tentang pembiayaan	0.03	2.8	0.08
7	Kurangnya minat anggota untuk menabung	0.08	2.5	0.20
8	Terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota	0.07	3.25	0.23
	Jumlah Faktor Kelemahan (**W**)	0.34		0.87
JUMLAH **(S + W)**		1.00		3.09

Sumber : Data Primer 2019

Pada penelitian ini pernyataan pada adanya pengesahan badan hukum koperasi pada rating yang sangat baik 4 dengan bobot 0.07 dan skor 0.28. Selanjutnya pada pernyataan Lokasi Koperasi Strategis pada rating mendekati sangat baik yaitu 3.85, bobot 0.07 dan skor 0.27. Selanjutnya pada pernyataan

mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan memperoleh rating baik 3.25, bobot 0.10 dan skor 0.33. Selanjutnya pada pernyataan Pelayanan ramah dan tanggap memperoleh rating 3.3, bobot 0.09 dan skor 0.30. Selanjutnya pada pernyataan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai memperoleh bobot 0.08, rating 3.1 dan skor 0.25. Selanjutnya pada pernyataan Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan memperoleh bobot 0.05, rating 3.05 dan skor 0.19. Selanjutnya pada pernyataan adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi syariah memperoleh bobot 0.13, rating 3.5 dan skor 0.44. Selanjutnya pada pernyataan pembinaaan dan pendidikan tentang koperasi syariah kepada anggota koperasi memperoleh bobot 0.06, rating 3 dan skor 0.18.

Pada pernyataan kelemahan masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi memperoleh bobot 0.02, rating 2.75 dan bobot 0.06. Selanjutnya pada pernyataan Besarnya pinjaman bermasalah memperoleh bobt 0.05, rating 1.1 dan skor 0.06. Selanjutnya pada pernyataan kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan memperoleh bobot 0.07, rating 2.85 dan skor 0.20. Selanjutnya pada pernyataan masih terbatasnya Unit Usaha Koperasi Syariah memperoleh bobot 0.01, rating 1.5 dan skor 0.02. Selanjutnya pada pernyataan penerapan operasional manajemen dan prosedur yang longgar memperoleh bobot 0.01, rating 3.15 dan skor 0.03. Selanjutnya pada pernyataan kurangnya pemahaman anggota tentang pembiayaan memperoleh bobot 0.03, rating 2.8 dan skor 0.08. Selanjutnya pada pernyataan kurangnya minat anggota untuk menabung memperoleh bobot 0.08, rating 2.5 dan skor 0.20. Selanjutnya pada

pernyataan terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota memperoleh bobot 0.07, rating 3.25 dan skor 0.23.

4.5.2 Matrik TOWS

Matrik TOWS merupakan salah satu alat pada tahap pencocokan yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi yakni strategi SO (kekuatan, peluang), strategi WO (kelemahan, peluang, strategi ST(kekuatan, ancaman), strategi WT (kelemahan, ancaman). Adapun pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10

Matrik TOWS

Faktor Internal / Faktor Eksternal	**Kekuatan (*Strengths*)** 1. Adanya Pengesahan badan hukum koperasi 2. Lokasi Koperasi Strategis 3. Mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan 4. Pelayanan ramah dan tanggap 5. Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai 6. Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan 7. Adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi syariah 8. Pembinaaan dan pendidikan tentang koperasi syariah kepada anggota koperasi	**Kelemahan (*Weaknesses*)** 1. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi 2. Besarnya pinjaman bermasalah 3. Kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan 4. Masih terbatasnya Unit Usaha Koperasi Syariah 5. Penerapan operasional manajemen dan prosedur yang longgar 6. Kurangnya pemahaman anggota tentang pembiayaan 7. Kurangnya minat anggota untuk menabung 8. Terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota
Peluang (Opportunities) 1. Adanya kebijakan pemerintah kota padang panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah	**Strategi S-O** 1. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan 2. Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan koperasi	**Strategi W-O** 1. Optimalisasi peran koperasi dalam hal meningkatkan kapasitas permodalan, standar manajemen dan penerapan prinsip syariah serta

2. Perhatian koperindag kota Padang Panjang untuk pengembangan Koperasi Syariah 3. Komitmen masyarakat untuk menjalankan syariat islam 4. Adanya pendampingan dari lembaga pendidikan 5. Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat 6. Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor 7. Besarnya pelaku usaha mikro yang berminat terhadap layanan koperasi 8. Besarnya komitmen pemerintah kota sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah 9. Menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota	sesuai prinsip syariah	pemanfaatan teknologi informasi 2. Menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan akses pendanaan yang murah 3. Meningkatkan pengawasan internal 4. Memperbanyak atau membuat unit usaha
Ancaman (Threats) 1. Persaingan dengan lembaga keuangan lain 2. Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis IT 3. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah 4. Lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah 5. Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan 6. Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan 7. Gaji anggota langsung di tarik oleh bank sehingga tidak bisa membayar cicilan pembiayaan	**Strategi S-T** 1. Optimalisasi pelayanan dan pembinaan usaha anggota untuk memotivasi loyalitas dan minat menabung anggota 2. Memperbanyak pendidikan/ pelatihan pengurus untuk meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen dan penerapan prinsip syariah 3. Mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan anggota secara merata di bidang perkoperasian dan penerapan pola syariah	**Strategi W-T** 1. Penyempurnaan dan mengefektifkan penerapan dan pelaksanaan prinsip syariah 2. Meningkatkan modal sendiri melalui simpanan anggota 3. Meningkatkan kualitas SDM yang handal dan tangguh

4.5.3 Matrik Internal – Eksternal (IE)

Pada matrik Internal - Eksternal (IE) terdapat 2 dimensi yakni: total skor dari matrik IFE terletak di sumbu X (horizontal) dan total skor dari matrik EFE terletak pada sumbu Y (vertikal). Berdasarkan hasil dari analisis pada matrik IFE dan matrik EFE pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang, maka dapat diketahui sumbu X pada matrik IE sebesar 3,09 dan sumbu Y pada matriks IE sebesar 3,22.

Maka gambaran posisi Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11

Matriks IE

Total Skor IFE (3.09)

Total Skor EFE (3.22)	**4** Kuat	**3** Sedang	**2** Lemah	**1**
Kuat **3**	I (3.09 / 3.22)	**II**	III	
Sedang **2**	IV	V	VI	
Lemah **1**	VII	VIII	IX	

Hasil dari matrik Internal – Eksternal (IE) di atas dapat diterjemahkan bahwa pengembangan Koperasi Syariah berada pada sel I, maka pengembangan Koperasi Syariah memiliki strategi alternatif tumbuh dan membangun.

Berdasarkan hasil-hasil yang didapat dari analisis internal dan eksternal pada Tabel seperti dituliskan di atas, hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Jumlah faktor Kekuatan (S) = 2,23

2. Jumlah faktor Kelemahan (W) = 0,87

3. Jumlah faktor Peluang (O) = 2,51

4. Jumlah faktor Ancaman (T) = 0,71

Untuk mencari koordinatnya, dapat dicari dengan cara sebagai berikut:

1. Koordinat Analisis Internal

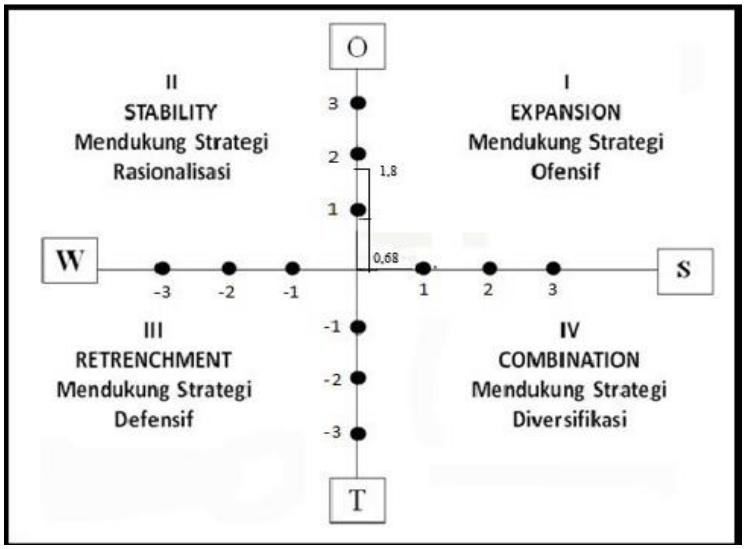
(Jumlah S – Jumlah W) : 2 = (2,23 – 0,87) : 2 = 0,68

2. Koordinat Analisis Eksternal

(Jumlah O – Jumlah T) : 2 = (2,51– 0,71) : 2 = 1,8

Jadi titik koordinatnya terletak pada (0,68 ; 1,8)

Berikutnya, hasil koordinat tersebut disajikan pada diagram matriks TOWS untuk mengetahui posisi perusahaan



Gambar 4.1

Diagram Matrik

Berdasarkan data matrik IFE yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan sebesar 3,09 dan EFE yang terdiri dari peluang dan ancaman sebesar 3,22. Maka garis grand strategi pada Perkembangan Koperasi Syariah yakni: sumbu X = 3,09 dan sumbu Y = 3,22. Jadi dapat diterjemahkan Perkembangan Koperasi Syariah berada pada kuadran I yaitu:

1. Strategi I (Membangun Pasar)

   Strategi ini memperluas segmentasi pasar agar terciptanya pangsa pasar yang baru. Alternatif strategi yang peneliti tawarkan yakni membuka unit usaha dan kantor bagi setiap koperasi, meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan serta mengoptimalkan pengayaan ilmu kepada anggota dan pengurus dibidang koperasi syariah.

2. Strategi 2 (penetrasi pasar)

   Strategi untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih luas melalui usaha marketing yang besar-besaran. Alternatif yang peneliti tawarkan adalah dengan menggencarkan promosi dan mengadakan pelatihan tentang koperasi syariah dan pemahanan mudahnya melakukan transaksi/pembiayaan dengan prinsip syariah, dipromosikan pada media social dan koran.

3. Strategi 3 (diservikasi tidak terkait)

   Strategi ini adalah menawarkan produk yang baru namun memiliki saling keterkaitan. Alternatif strategi yang peneliti tawarkan adalah menawarkan produk koperasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan, dan meminimkan margin dari pinjaman.

4.5.4 QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrik)

Tahap pengambilan keputusan merupakan tahap untuk menentukan daftar alternatif strategi prioritas untuk diimplementasikan dalam pengembangan koperasi syariah di Kota Padang Panjang. QSPM adalah alat yang direkomendasikan bagi peneliti untuk mengevaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor utama internal dan eksternal pada matrik IFE, EFE, I-E, serta matrik SWOT. Berikut ini tabel QSPM yang berfungsi sebagai klasifikasi strategi berdasarkan strategi yang dihasilkan dengan faktor lingkungan internal dan eksternal sehingga mempermudah untuk memberikan penilaian.

Tabel 4.12

QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrik)

No	Faktor Strategi Internal	Bobot	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3	
			AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
Key Internal Factors								
Strength (Kekuatan)								
1	Adanya Pengesahan badan hukum koperasi	0.07	4	0.28	4	0.28	4	0.28
2	Lokasi Koperasi Strategis	0.07	4	0.28	4	0.28	4	0.28
3	Mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan	0.10	3	0.30	4	0.40	4	0.40
4	Pelayanan ramah dan tanggap	0.09	4	0.36	4	0.36	4	0.36
5	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai	0.08	4	0.32	3	0.24	3	0.24
6	Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan	0.06	4	0.24	4	0.24	3	0.18
7	Adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi syariah	0.13	4	0.50	4	0.50	3	0.38
8	Pembinaaan dan pendidikan tentang koperasi syariah kepada anggota koperasi	0.06	4	0.24	2	0.12	2	0.12
Weaknesess (Kelemahan)								
1	Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi	0.02	3	0.06	4	0.08	3	0.06
2	Besarnya pinjaman bermasalah	0.05	4	0.20	2	0.10	1	0.05
3	Kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan	0.07	4	0.28	2	0.14	1	0.07
4	Masih terbatasnya Unit Usaha Koperasi Syariah	0.01	4	0.04	2	0.02	3	0.03
5	Penerapan operasional manajemen dan prosedur yang longgar	0.01	4	0.04	2	0.02	2	0.02
6	Kurangnya pemahaman anggota tentang pembiayaan	0.03	4	0.12	3	0.09	4	0.12
7	Kurangnya minat anggota untuk menabung	0.08	4	0.32	4	0.32	2	0.16
8	Terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota	0.07	4	0.28	4	0.28	4	0.28
JUMLAH **(S + W)**		1.00						

Peluang (Opportunities)								
1	Adanya kebijakan pemerintah kota padang panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah	0.10	4	0.40	4	0.40	4	0.40
2	Perhatian koperindag kota Padang Panjang untuk pengembangan Koperasi Syariah	0.09	3	0.27	3	0.27	3	0.27
3	Komitmen masyarakat untuk menjalankan syariat islam	0.09	4	0.36	4	0.36	4	0.36
4	Adanya pendampingan dari lembaga pendidikan	0.08	3	0.24	3	0.24	3	0.24
5	Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat	0.09	4	0.36	4	0.36	4	0.36
6	Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor	0.05	4	0.20	3	0.15	1	0.05
7	Besarnya pelaku usaha mikro yang berminat terhadap layanan koperasi	0.02	4	0.08	4	0.08	4	0.08
8	Besarnya komitmen pemerintah kota sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah	0.09	4	0.36	4	0.36	4	0.36
9	Menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota	0.09	4	0.36	4	0.36	4	0.36
Ancaman (Threats)								
1	Persaingan dengan lembaga keuangan lain	0.04	4	0.16	4	0.16	4	0.16
2	Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis IT	0.02	4	0.08	4	0.08	3	0.06
3	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah	0.05	4	0.20	4	0.20	3	0.15
4	Lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah	0.05	4	0.20	1	0.05	1	0.05
5	Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan	0.04	4	0.16	4	0.16	4	0.16
6	Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan	0.05	3	0.15	4	0.20	4	0.20
7	Gaji anggota langsung di tarik oleh bank sehingga tidak bisa membayar cicilan pembiayaan	0.05	4	0.20	2	0.10	4	0.20
Total				**7.65**		**7.01**		**6.49**

4.6 Faktor Peluang, Ancaman, Kekuatan dan Kelemahan

4.6.1 Peluang

Berdasarkan perhitungan dari matriks EFE menunjukkan hasil bahwa Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang memiliki tiga peluang utama dalam pengembangan usaha yaitu :

a. Adanya kebijakan pemerintah kota Padang Panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah
b. Menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota
c. Besarnya komitmen pemerintah kota sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah

4.6.2 Ancaman

Berdasarkan perhitungan dari matriks EFE menunjukkan hasil bahwa Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang memiliki tiga ancaman utama dalam pengembangan usaha yaitu :

a. Pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan
b. Lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah
c. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah

4.6.3 Kekuatan

Berdasarkan perhitungan dari matriks IFE menunjukkan hasil bahwa Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang memiliki tiga kekuatan utama dalam pengembangan usaha yaitu:

a. Adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi syariah
b. Mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan
c. Pelayanan ramah dan tanggap

4.6.4 Kelemahan

Berdasarkan perhitungan dari matriks IFE menunjukkan hasil bahwa Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang memiliki tiga kelemahan utama dalam pengembangan usaha yaitu:

a. Terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota
b. Kurangnya minat anggota untuk menabung
c. Kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan

4.7 Rumusan Alternatif Strategi

Dari hasil analisis *Quantitative Strategic Matriks Planning* (QSPM) dapat diketahui bahwa strategi terbaik yang peneliti rekomendasikan yang fleksibel untuk diimplementasikan untuk pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang yaitu strategi 1 yakni strategi membangun pasar (membuka unit usaha dan kantor bagi setiap koperasi, meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan serta mengoptimalkan pengayaan ilmu kepada anggota dan pengurus dibidang koperasi syariah) dengan attactivesness score sebesar 7,65.

4.8 Implikasi Penelitian

Strategi pengembangan Koperasi Syraiah yang dihasilkan berimplikasi terhadap berbagai aspek yaitu:

1. Teknis

   Implikasi penerapan strategi pengembangan Koperasi Syariah dalam aspek teknis adalah Koperasi perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM pengurus atau karyawan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan mutu SDM, meningkatkan kinerja manajemen, penerapan syariah dan kualitas layanan.

2. Ekonomi

   Dalam aspek ekonomi, terbatasnya modal yang dimiliki membuat Koperasi Syariah sulit untuk memberikan pembiayaan kepada anggota oleh karena itu perlu dibentuk unit usaha dan prinsip kehati-hatian perlu dijalankan dengan tidak menghambat optimasi penyaluran pembiayaan kepada anggota dan mempertimbangan kemampuan dalam memberikan layanan pembiayaan secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan anggota. Penyempunaan prosedur dan peningkatan SDM diperlukan.

3. Sosial

   Optimasi pembinaan/pendampingan kepada anggota Koperasi yang berjalan, diharapkan membantu dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan anggota, yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas anggota.Untuk itu diperlukan pola pembinaan dan pendampingan efektif sesuai dengan karakteristik anggota.

4. Lingkungan

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha, Koperasi perlu menjalin kemitraan/ jaringan kerjasama dengan pemerintah secara aktif berhubung dengan perhatian pemerintah kota Padang Panjang. Untuk itu, diperlukan kesiapan KJKS untuk menerima perubahan dan keterbukaan dalam manajemen pengelolaan, serta menerima standar-standar Koperasi Syaraiah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Design Strategi Pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang, maka dapat disimpulkan :

1. Aspek-aspek yang dimiliki untuk Pengembangan Koperasi Syariah di kota Padang Panjang untuk Konversi ke Koperasi Syariah yaitu:
   a. Aspek regulasi dan dukungan pemerintah kota Padang Panjang
   b. Aspek religiusitas
2. Faktor external dan internal pengembangan koperasi Syariah di Kota Padang Panjang:

   Berdasarkan perhitungan dari matriks EFE menunjukkan hasil bahwa Koperasi memiliki tiga peluang utama dalam pengembangan usaha yaitu: Adanya kebijakan pemerintah kota Padang Panjang untuk percepatan konversi ke koperasi syariah, menjadi prioritas yang tertuang dalam visi misi Walikota, besarnya komitmen pemerintah kota sebagai kota serambi mekah mendukung dan mendorong kemajuan koperasi syariah. Koperasi memiliki tiga ancaman utama yaitu: pesatnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan, lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap

koperasi dan penerapan syariah.

Berdasarkan perhitungan dari matriks IFE menunjukkan hasil bahwa koperasi Syariah di Kota Padang Panjang memiliki tiga kekuatan utama dalam pengembangan usaha yaitu adanya komitmen pengurus dan anggota untuk segera konversi ke koperasi Syariah, mudahnya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan, pelayanan ramah dan tanggap. Pengembangan koperasi Syariah di Kota Padang Panjang juga memiliki tiga kelemahan utama dalam pengembangan usaha yaitu: terbatasnya kemampuan untuk melakukan pembiayaan kepada anggota, kurangnya minat anggota untuk menabung, kompetensi SDM yang belum mengetahui tentang pembiayaan.

3. Posisi matriks IE menunujukkan posisi Koperasi Syariah berada pada sel I, maka pengembangan Koperasi Syariah memiliki strategi alternatif tumbuh dan membangun. (skor 3,09: 3,22). Strategi pengembangan yang dihasikan dari matrik TOWS dan pembobotan dari matrik QSP dapat diketahui bahwa strategi terbaik yang peneliti rekomendasikan yang fleksibel untuk diimplementasikan untuk pengembangan Koperasi Syariah di Kota Padang Panjang yaitu strategi 1 yakni strategi membangun pasar (membuka unit usaha dan kantor bagi setiap koperasi, meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan serta mengoptimalkan pengayaan ilmu kepada anggota dan pengurus dibidang koperasi syariah) dengan attactivesness score sebesar 7,65.

5.2 Implikasi Keilmuan

Secara keilmuan, kajian ini berkontribusi dalam memberikan sebuah pengayaan terhadap strategi pengembangan koperasi syariah.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian, diantaranya adalah Penelitian ini terbatas dalam hal meneliti semua koperasi yang ada di kota Padang Panjang karena saat ini baru 20 Koperasi yang diprogramkan pemerintah kota Padang Panjang untuk konversi.

5.3 Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah :

1. Dengan adanya perhatian pemerintah kota Padang Panjang terhadap percepatan Koperasi Syariah, Pengurus dan pengawas pada masing-masing koperasi seharusnya juga ikut mendukung proses konversi ini dengan cara lebih serius lagi dalam hal manajemen Koperasi Syariah.
2. Koperasi baiknya meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan serta mengoptimalkan pengayaan ilmu kepada anggota dan pengurus dibidang koperasi syariah.